

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana didalam ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sumberdaya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sehingga perlu dijaga guna kelestariannya dimasa kini dan masa mendatang, sebab manusia dan lingkungannya ialah satu-kesatuan yang saling bergantung antara satu dan lainnya, dimana satu kerusakan sumberdaya alam yang ada akan mempengaruhi sumberdaya alam yang lain, pada akhirnya juga berdampak pada manusia itu sendiri.

Mengenai sumberdaya alam, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alamnya, Dimana Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi serta mempunyai keunikan tersendiri yang terlihat dari berbagai macam ekosistem yang ada seperti ekosistem pantai, ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem savana, dan lain-lain, dimana masing-masing ekosistem ini memiliki keanekaragaman tersendiri.¹

Nilai keberagaman ini bermakna bahwa dengan adanya keanekaragaman hayati digunakan sebagai sumberdaya alam terbaharui bagi masyarakat itu sendiri. Sementara sumberdaya alam mempunyai dua bentuk yaitu pertama, sumberdaya alam yang dapat diperbaharui meliputi air, tanah, tumbuhan dan hewan. Kedua, sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, timah dan nikel.

¹Nyoman Wijana, Nopember 2014, *Biologi Dan Lingkungan*, Yogyakarta, Plantaxia, Hal.42, 50, 55, 93, dan 207.

Salah satu keanekaragaman hayati di Indonesia yang memiliki banyak keberagaman jenisnya ialah satwa, dimana satwa ini digolongkan menjadi dua yaitu satwa liar dan satwa peliharaan. Kemudian satwa digolongkan lagi menjadi dua yaitu satwa endemik adalah hewan persebarannya yang terbatas pada daerah tertentu saja, dan hewan atau tumbuhan yang persebarannya luas.

Jenis-jenis dari satwa tersebut mempunyai banyak ragam baik itu satwa jenis burung, satwa jenis mamalia, reptilia, serta spesies-spesies jenis lain yang tentunya karena keunikan dan kekhasannya mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi pula. Sehingga tidak heran banyak dari penjuru dunia berkunjung ke Indonesia baik itu para ilmuwan dan/atau peneliti, maupun wisatawan untuk melihat potensi kekayaan alam yang ada.²

Namun sangat memperhatikan saat ini keanekaragaman satwa Indonesia populasinya menurun, bahkan banyak yang mengalami bahaya kepunahan. Kepunahan spesies adalah suatu peristiwa yang alami karena dizaman dahulu kala guna memenuhi kebutuhan konsumsi, manusia bergantung pada hasil hutan termasuk didalamnya satwa. Namun pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan justru akan merusak lingkungan yang ada, sebab manusia serta keanekaragaman hayati adalah satu kesatuan yang saling berhubungan timbal balik, seperti proses fotosintesis sebagai rantai makanan didalam hutan, dimana satwa yang satu bergantung pada satwa yang lainnya, serta bergantung pada sumberdaya alam lain serta pada manusia sebagai pelaku utama dalam

²*Ibid*, Hal.1, Nyoman Wijana, Nopember 2014, Biologi Dan Lingkungan, Hal.50.

memelihara sumberdaya alam guna kebutuhan dimasa kini dan masa yang akan datang manusia itu sendiri.

Melihat dari kondisi keanekaragaman hayati jenis satwa saat ini, manusia pulalah salah satu faktor penyebab terancamnya satwa dalam bahaya kepunahan.³ Dimana pertumbuhan manusia semakin pesat, pengikisan hutan dan lautpun terjadi guna pembukaan lahan untuk (perkebunan/pertanian, peternakan, penambakkan, penambangan), juga pembangunan pemukiman untuk perumahan, pembangunan gedung-gedung bertingkat, tempat wisata serta untuk kepentingan teknologi, dengan berkedok guna untuk peningkatan pembangunan serta perekonomian Indonesia, namun tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan yang ada.⁴

Adanya pengikisan hutan dan laut maka satwa-satwa harus mencari habitat baru, namun terhadap satwa yang endemik tidak mudah menemukan tempat yang baru, serta tidak mudah menyesuaikan dengan habitat barunya, sehingga satwa-satwa endemik tersebut tidak jarang banyak yang mati karena tidak mampu bertahan hidup. Selain itu penyebab terancamnya satwa dalam bahaya kepunahan ialah maraknya perburuan satwa, perdagangan satwa, serta perilaku konsumsi dari masyarakat adat atau budaya dalam masyarakat di daerah-daerah tertentu.⁵

³Nyoman Wijana, Nopember, 2014, *Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Hal.8, 9, 190.

⁴*Op.Cit*, Hal.1, Nyoman Wijana, Nopember 2014, *Biologi Dan Lingkungan*, Hal.55.

⁵Hadi S. Alikodra, Mei 2010, *Teknik Pengelolaan Satwa Liar Dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Bogor, IPB Press, Hal.198, 199, 200, 222.

Jika kondisi diatas terus berlangsung sudah tentu lambat laun satwa-satwa di Indonesia benar-benar mengalami kepunahan, sehingga diperlukan kebijakan hukum dalam rangka perlindungan dan pengelolaan terhadap satwa yang salah satunya ialah melindungi satwa dari maraknya perdagangan satwa secara ilegal. Kebijakan hukum ini diwujudkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur sebagai berikut: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁶ Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat dimaknai bahwa kekayaan alam ialah seluruh komponen kehidupan sumberdaya alam yang didalamnya termasuk satwa, dimana masyarakat Indonesia berhak memanfaatkan sumberdaya alam yang ada serta berkewajiban menjaga sumberdaya alamnya. Sedangkan aparat hukum dan/atau pemerintah harus mampu mengendalikan tindakan-tindakan setiap individu masyarakatnya dengan tertib melalui kebijakan yang dibuat sebagai landasan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga setiap tindakan individu masyarakatnya harus berdasarkan prosedur hukum, serta terkontrol oleh petugas-petugas yang diberi wewenang dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan disetiap wilayahnya masing-masing.

Pelaksanaan amanah undang-undang dasar 1945 atau yang biasa disingkat UUD 1945, dalam hal perdagangan satwa Indonesia meratifikasi konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar atau

⁶Wartiningsih, Oktober 2014, *Pidana Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Malang, Setara Press, Hal.22.

yang biasa disebut CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43 tahun 1978 tentang mengesahkan "*convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*", yang telah ditandatangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973, sebagaimana terlampir pada keputusan presiden ini. CITES memuat pengaturan mengenai kerjasama perlindungan satwa antar negara yang mengatur mengenai perdagangan satwa secara komersial, memuat jenis-jenis satwa yang tidak terancam kepunahan tapi sewaktu-waktu bisa terancam punah, serta mengatur satwa-satwa yang dilindungi, yang terbagi kedalam 3 bagian yaitu appendix I, appendix II, dan appendix III.

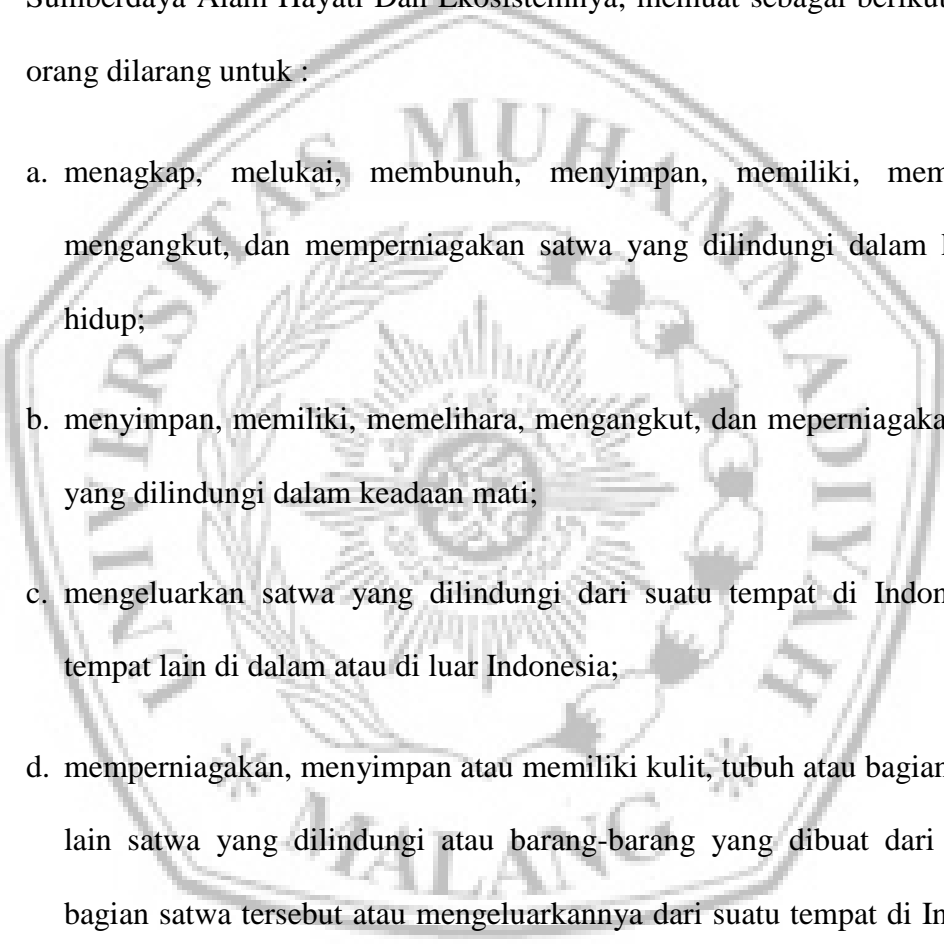
Berdasarkan Konvensi CITES ini pemerintah menerbitkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang diantaranya mengatur mengenai perdagangan satwa.⁷

Perihal perdagangan satwa ini begitu marak terjadi di Indonesia, sehingga penulis mencoba mengkajinya didalam Penulisan Tugas Akhir ini, dengan mengambil kasus perdagangan satwa yang ada di Manado Sulawesi Utara atau tepatnya berada di Kota Tomohon yang terkenal dengan Pasar Tradisional Beriman yang ekstrim, disini pedagang-pedagang memperjual belikan beberapa jenis satwa liar tergolong langka yang dilindungi hukum yaitu monyet hitam Sulawesi (*macaca nigra*), kucing hutan (meong congkak) dan

⁷Hadi S Alikodra, September, 2012, *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pendekatan Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi* (Rangkuman), Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

babi rusa) dalam keadaan mati dan sudah dipotong-potong, dan ada yang sudah terpenggang.

Sementara peraturan mengenai satwa yang dilindungi berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, memuat sebagai berikut, Setiap orang dilarang untuk :

- 
- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Maka berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati diatas, jual-beli satwa yang dilindungi

adalah tindak pidana. Maka bagi siapa yang melanggarnya diberi sanksi sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan :

- (2). Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi hukum tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, yang diantaranya adalah monyet hitam Sulawesi (*macaca nigra*), kucing hutan (*meong congkak*) dan babi rusa.⁸ Namun Jenis satwa yang terancam punah tidak bergantung pada lampiran undang-undang Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, melainkan melihat dari jumlah populasi yang ada saat ini atau masa mendatang, bisa jadi jenis satwa yang tidak tertera dalam lampiran mengalami

⁸*Ibid*, Hal.5, Hadi S Alikodra, September, 2012, *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pendekatan Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi* (Rangkuman).

bahaya kepunahan, atau jenis satwa yang mulanya terancam bahaya kepunahan populasinya menjadi stabil karena pengelolaan yang maksimal. Sehingga untuk meminimalisir angka kepunahan satwa tergantung dari bagaimana masyarakat berkerjasama dengan petugas-petugas yang berwenang dalam mengelola sumberdaya alamnya agar terjaga kelestariannya, jadi populasi satwa tergantung bagaimana suatu negara, daerah, dan masyarakatnya dalam mengelolah dan melindungi satwanya.⁹

Sementara perdagangan satwa yang dilindungi sebagaimana didalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, pelaksanaannya diatur didalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, yang mengatur sebagai berikut: “(1) Barangsiapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.”

Perdagangan Satwa juga diatur didalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang

⁹*Ibid*, Hal.5, Hadi S Alikodra, September, 2012, *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pendekatan Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi* (Rangkuman).

Perdagangan, Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:

ayat (1)

- a. melindungi kedaulatan ekonomi;
- b. melindungi keamanan negara;
- c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
- d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
- e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
- f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
- g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

ayat (2) Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdaganganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Kemudian didalam Pasal 36 jo Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Memuat Larangan dan Sanksi berikut ini:

Pasal 36 :

- Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 110

- Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan pengaturan mengenai perdagangan satwa sebagai Tindak Pidana ini tentunya ialah upaya untuk perlindungan serta pengelolaan terhadap sumberdaya alam, khususnya mengenai keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang berupa satwa. Dengan tujuan untuk mewujudkan tiga sasaran konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah, dan pemanfaatan secara lestari.¹⁰ Dimana ketiga sasaran konservasi adalah sebagai latar belakang diberlakukannya undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Sehingga setaip orang yang memperjual belikan satwa yang dilindungi oleh hukum diberikan sanksi tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Mengingat perdagangan di Pasar Tradisional Beriman Kota Tomohon memperjual belikan satwa liar langka dilindungi yang sudah dalam keadaan mati, maka perdagangan satwa tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (2b) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan

¹⁰Saifullah, Januari, 2007, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Malang, UIN Malang Press, Hal.125.

Ekosistemnya, jo Pasal 56 ayat (1) sampai dengan ayat (2), jo pasal (56) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang : Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

Sesungguhnya dari berbagai macam peraturan yang ada bisa memberikan perlindungan terhadap satwa langka yang terancam bahaya kepunahan. Namun di Pasar Tradisional Beriman Tomohon Manado ini bisa membuat orang tercengang aneh melihatnya, dimana penjualan satwa liar langka yang dilindungi (monyet hitam Sulawesi (*macaca nigra*), kucing hutan, dan babi rusa), justru diperjualbelikan. Berdasarkan situasi inilah membuat penulis tertarik mencoba mengkaji dari segi perspektif hukum dengan mengangkat judul sebagai berikut : **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA TINDAK PIDANA JUAL BELI SATWA LIAR LANGKA YANG DILINDUNGI (MONYET HITAM SULAWESI (*MACACA NIGRA*), KUCING HUTAN (MEONG CONGKAK), DAN BABI RUSA DI PASAR TRADISIONAL BERIMAN TOMOHON-MANADO”**, (Studi di Balai Pengamanan Dan Pengeakkan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado-Sulawesi Utara)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas Penulis mencoba mengkaji lewat penelitian lapangan dengan mengangkatnya dari segi-segi permasalahan berikut ini:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab maraknya tindak pidana jual beli satwa liar langka yang dilindungi (monyet hitam Sulawesi (*macaca nigra*), kucing hutan (meong congkak), dan babi rusa) di Pasar Tradisional Beriman Tomohon-Manado?
2. Bagaimana peranan masyarakat (lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap maraknya tindak pidana jual beli satwa liar langka yang dilindungi monyet hitam Sulawesi (*macaca nigra*), kucing hutan (meong congkak), dan babi rusa di Pasar Tradisional Beriman Tomohon?
3. Bagaimana Peranan Instansi Pemerintahan dan aparat hukum terhadap upaya pengamanan dan penegakan hukum tindak pidana jual beli satwa liar langka yang dilindungi (monyet hitam Sulawesi (*macaca nigra*), kucing hutan (meong congkak), dan babi rusa) di Pasar Tradisional Beriman Tomohon Manado?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana jual beli satwa liar langka yang dilindungi (monyet Sulawesi (*macaca nigra*),

kucing hutan (meong congkak), dan babi rusa), oleh pedagang-pedagang di Pasar Tradisional Beriman Tomohon-Manado;

2. Untuk mengetahui peranan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap satwa-satwa yang ada di Tomohon Khususnya satwa yang dilindungi oleh hukum
3. Bagaimana Peranan Instansi Pemerintahan dan aparat hukum terhadap upaya pengamanan dan penegakan hukum tindak pidana jual beli satwa liar langka dilindungi (monyet hitam Sulawesi (*macaca nigra*), kucing hutan (meong congkak), dan babi rusa) di Pasar Tradisional Beriman Tomohon-Manado?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh Penulis dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan bisa menjadi bahan panduan dalam mempelajari ilmu hukum khususnya ruang lingkup hukum lingkungan
2. Bagi aparat hukum, Pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lingkungan hidup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pasal 21 ayat (2b) jo pasal 21 ayat (2d) undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya kontribusi atau sumbangsi pandangan agar dapat menjalankan aturan hukum yang tertuang didalam pasal 21 ayat (2) undang-undang no 5 tahun 1999 tentang konservasi

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya khususnya mengenai tindak pidana jual beli satwa langka, sehingga dassein dan dassolen sejalan.

3. Bagi masyarakat diharapkan bisa memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai lingkungan hidup terkhusus tentang satwa-satwa yang dilindungi, sehingga masyarakat dapat bersama-sama menjaga kelestarian sumberdaya alamnya.
4. Bagi Penulis sendiri diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum lingkungan hidup sehingga dapat dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan, dan khususnya sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di bidang ilmu hukum.

E. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengembangkann pola pikir serta kemampuan analisis secara ilmiah serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan-pengembangan studi ilmu hukum terkhusus mengenai hukum lingkungan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni meneliti langsung dilapangan mengenai faktor-faktor penyebab maraknya tindak pidana jual beli satwa liar langka yang dilindungi oleh hukum (monyet hitam Sulawesi (*macaca nigra*), kucing hutan (meong congkak), dan babi rusa), dengan mengacu pada ketentuan pasal 21 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta perundang-undangan terkait lainnya.

2. Lokasi Penelitian Dan Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Wilayah Hukum Balai Pengamanan Dan Pengekan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado-Sulawesi Utara.

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi Pasar Tradisional Beriman Kota Tomohon-Manado merupakan lokasi yang terkenal dengan pasar ekstrimnya, dimana terdapat beberapa jenis satwa liar monyet hitam Sulawesi (*macaca nigra*), kucing hutan (meong congkak), dan babi rusa diperjual belikan di Pasar ini. Pada hal jenis-jenis satwa tersebut termasuk kedalam golongan satwa yang dilindungi oleh hukum yang merupakan jenis satwa liar endemik yang langka, sebagaimana tertuang didalam lampiran Peraturan Pemerintah

nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Selain itu pedagang-pedagang memperjualkan satwa monyet Sulawesi (*macaca nigra*), kucing hutan (meong congkak), dan babi rusa sudah dalam keadaan mati dan bahkan bagian-bagian tubuhnya ada yang sudah terpotong-potong. Perbuatan ini melanggar pasal 21 ayat (2b) jo pasal 21 ayat (2d) undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya perihal perniagaan satwa, namun pada prakteknya pedagang-pedagang justru marak memperjual belikan satwa yang dilindungi oleh hukum tersebut, pada hal Kota Tomohon adalah wilayah yang memberlakukan hukum nasional sebagai landasan norma-norma didalam bermasyarakat, sehingga kondisi ini membuat penulis tertarik untuk menelusuri secara langsung lapangan, apa yang menjadi penyebab maraknya jual beli satwa liar langka yang dilindungi (monyet hitam Sulawesi (*maca nigra*), kucing hutan (meong congkak), dan babi rusa yang jelas-jelas merupakan tindak pidana.

3. Sumber Data

Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan beberapa jenis bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan sumber data yang didapat dari Lapangan tempat terjadinya perkara, instansi-instansi yang berwenang dalam penyelamatan satwa, organisasi-organisasi perlindungan satwa, serta masyarakat.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang didapat dari buku, dokumen-dokumen, dan jurnal sebagai sumber data pelengkap kedua, guna mendukung sumber data primer seperti:

- Buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis
- Jurnal Hukum
- Peraturan perundang-undangan

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan penelitian secara langsung, dengan terjun ke Pasar melihat transaksi perdagangan satwa liar langka yang dilindungi dengan objek yang berupa Pasar Tradisional Beriman Kota Tomohon, sementara jenis satwanya berupa (monyet hitam Sulawesi (*macaca nigra*), kucing hutan (meong congkak), dan babi rusa). Sedangkan subjek adalah setiap orang yang memperjual-belikan satwa jenis tersebut yang berupa (Pedagang dan Pembeli serta setiap Instansi Pemerintah maupun penegak hukum yang terlibat langsung dalam perlindungan satwa di Daerah Kota Tomohon.

b. Wawancara/Interview

Merupakan penelitian dengan cara berdialog atau diskusi langsung dengan Informan yang mengetahui dengan benar permasalahan yang menjadi penelitian dari Penulis. Informan disini adalah Penjual, Pembeli, Lembaga Swadaya Masyarakat (Bapak Frank Delano Manus selaku Shelter Manejer LSM Animal Friends Manado Idonesia di Kota Tomohon, Bapak Ance Tatinggulu selaku Petugas Kawasan Lindung dan Bapak Harry Hilser selaku Manager Peneliti di LSM Selamatkan Yaki Kota Manado), Instansi Pemerintah Kota Tomohon (Ibu Emmy selaku Bidang Perdagangan dan Pemasaran Perusahaan Daerah Pasar Tomohon, Bapak Ferry Tuelah selaku Staff Pelaksana Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tomohon, Bapak Mentu Kepala Badan Pemberdayaan Dan Pengembangan Sumberdaya Alam Kota Tomohon, Bapak Drs Agustinus W Sendak selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Tomohon, Bapak Carles Lumanaw selaku Resert Kriminal POLRES Kota Tomohon, Ibu Ester Nangka S.E. selaku Seksi Konservasi Sumberdaya Alam Dan Sumber Air, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon), Instansi Pemerintah Provinsi-Manado (Bapak Agil selaku Bidang Perlindungan Kehutanan Di Dinas Kehutanan Manado, Ibu Novita Staff Bagian Administrasi Balai Konservasi Sumberdaya Alam Manado, dan Bapak Donnie Engka selaku Koordinator PPNS Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado).

c. Dokumentasi

Merupakan penelitian dengan mengambil data dari hasil observasi langsung di lapangan yang berupa rekaman hasil wawancara, gambar dan/atau photo serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yang berupa Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang, Keputusan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Peraturan Menteri Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia).

d. Studi pustaka

Merupakan penelitian dengan cara melakukan penelusuran terhadap kepustakaan yang penulis dapat dari buku-buku dan jurnal dari web-web Internet, serta perundang-undangan.

3. Analisa Data

Merupakan penelitian dengan cara menganalisis semua jenis data bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif pada objek penelitian sesuai permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis, dengan melihat ketimpangan yang terjadi antara perundang-undangan dengan fakta yang terjadi didalam masyarakat sehingga diperoleh suatu kesimpulan lalu kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan judul yang diangkat dalam penelitian hukum ini.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang dari judul dan atau tema yang diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi, sekaligus menjadi pengantar umum, yang didalamnya memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

BAB ini akan menampilkan pembahasan mengenai pertama, tinjauan umum tentang kebijakan hukum dalam perlindungan satwa (perlindungan satwa di zaman Kolonial Belanda, perlindungan satwa melalui *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora* (CITES), lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, serta kebijakan publik lain mengenai perlindungan satwa), kedua, mengenai tinjauan umum tentang instrumen hukum pidana dalam perlindungan satwa di Indonesia, khususnya mengenai perdagangan satwa (tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi merupakan bagian dari hukum lingkungan, kejahatan dan pelanggaran dalam tindak pidana perdagangan satwa), ketiga, tinjauan

umum tentang pengelola satwa (pengelola satwa, dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan satwa).

BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian jawaban dari analisis Penulis terhadap objek permasalahan yang diteliti, yang sesuai dengan landasan teori. Yang akan menampilkan pembahasan mengenai pertama gambaran umum (Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (BPPHLHK) Manado-Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pasar Tradisional Beriman Kota Tomohon), Kedua, faktor-faktor penyebab maraknya tindak pidana perdagangan satwa liar langka yang dilindungi (monyet hitam Sulawesi (*macaca nigra*), kucing hutan (meong congkak) dan babi rusa) di Pasar Tradisional Beriman Tomohon-Manado (tradisi dan kebiasaan konsumsi dilingkungan masyarakat Kota Tomohon dan Minahasa, konflik antara manusia dengan satwa liar, dimana satwa-satwa liar dianggap sebagai hama yang mengganggu tanaman dan membahayakan manusia, sebagai mata pencaharian pedagang-pedagang di Pasar Tradisional Beriman Kota Tomohon, satwa-satwa diperdagangkan secara terselubung, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Kota Tomohon dan Minahasa, baik pembeli maupun penjual mengenai perlindungan terhadap satwa liar, terbatasnya gerak organisasi dan/atau komunitas perlindungan satwa dalam upaya perlindungan satwa, dan kinerja pemerintahan dan penegak hukum belum optimal menjalankan tugasnya), Ketiga, peranan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap maraknya tindak pidana jual beli satwa liar langka yang dilindungi

(monyet hitam Sulawesi (*macaca nigra*), kucing hutan (meong congkak) dan babi rusa) di Pasar Tradisional Beriman Kota Tomohon (LSM Animal Friends Manado Indonesia (AFMI), LSM Selamatkan Yaki), keempat, peranan instansi pemerintah dan aparat hukum terhadap pengamanan dan penegakan hukum tindak pidana jual beli satwa liar langka yang dilindungi (monyet Sulawesi (*macaca nigra*), kucing hutan (meong congkak), dan babi rusa) di Pasar Tradisional Beriman Kota Tomohon-Manado

BAB IV: Penutup

Bab ini berisi uraian kesimpulan dari keseluruhan bab I, bab II, dan bab III, serta saran dari Penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Bab ini disebut sebagai bab terakhir dan/atau bab penutup dalam tulisan tugas akhir ini.